

Buletin AIPJ3

Buletin Edisi Keenam – September 2026



Pada 31 Juli 2026, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3) meluncurkan website resmi. Seiring berjalannya implementasi program, website ini akan memuat lebih banyak publikasi dan membagikan pesan-pesan inspiratif mengenai kegiatan strategis kemitraan dari media sosial masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan. Selamat membaca!



<https://www.aipj.or.id/>



Informasi Penting

AIPJ3 tidak memiliki akun media sosial. Harap berhati-hati jika menemukan akun-akun media sosial yang mengaku mewakili AIPJ3. Mohon untuk tidak mengikuti, berinteraksi atau membagikan konten dari akun-akun tersebut.

Memperkuat Kepemimpinan Perempuan di Seluruh Lembaga Indonesia



Atas perkenan Sekolah Polisi Wanita

Nur Hasyim, co-founder of Aliansi Laki-Laki Baru memberikan sesi tentang Karakteristik Generasi Z, Komunikasi Strategis yang Efektif, dan Metode Pembelajaran Interaktif yang Berfokus pada Siswa.

AIPJ3 terus mendukung penguatan kepemimpinan perempuan di seluruh lembaga peradilan dan keamanan Indonesia melalui serangkaian inisiatif pengembangan kapasitas yang mendorong kepemimpinan inklusif, reformasi kelembagaan, dan pengembangan profesional.

Melibatkan pimpinan, praktisi, dan aparat sipil negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berbagai inisiatif menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kerja di mana perempuan dapat memimpin, berkontribusi, dan berkembang. Strategi ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional Pemerintah Indonesia dan komitmen Pemerintah Australia untuk memajukan kesetaraan gender melalui kemitraan institusional.

[Baca Selengkapnya](#)



(dari kiri ke kanan) Nurasti Parlina, S.H., M.H. (Analisis Hukum, KY), Dr. Niken Savitri, S.H., MCL (Akademisi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan), Sukma Violetta, S.H., LL.M. (Komisioner KY 2016-2025) dan Jumain, S.E. (Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi, KY) dalam lokakarya penyempurnaan instrumen analisis putusan hakim terkait implementasi UU TPKS.



Putusan Pengadilan dalam Perkara Kekerasan Seksual Ditinjau oleh Komisi Yudisial, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Akademisi

Komisi Yudisial Indonesia, dengan dukungan dari AIPJ3 menggelar lokakarya di Jakarta pada 5 Agustus 2026 untuk menyempurnakan instrumen analisis putusan pengadilan dalam implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan mandat hukum, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk meninjau putusan pengadilan termasuk format, penalaran hukum, dan pemenuhan hak-hak korban. Analisis ini tidak bertujuan untuk mengubah atau membatalkan keputusan pengadilan namun memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

[Baca Selengkapnya](#)



Duduk di meja bundar bagian tengah depan (dari kiri ke kanan), Veronica Tan (Wakil Menteri PPPA), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., (Wakil Menteri Hukum), Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Menteri Hukum), Drs. H. Mukhtarudin (Menteri P2MI), Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (Wakil Menteri P2MI), dan Gita Kamath (Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia) dalam peluncuran kolaborasi tiga kementerian yang didukung oleh Pemerintah Australia.



Tiga Kementerian Berkolaborasi untuk Melindungi Perempuan, Anak, dan Pekerja Migran

Pemerintah Australia melalui AIPJ3 mendukung peluncuran kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta pada 23 Juli 2026. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, turut menghadiri acara tersebut bersama Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., Menteri P2MI Drs. H. Mukhtarudin, Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, dan Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

Melalui pelatihan bersama dan pembekalan teknis, kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, petugas layanan, paralegal, dan pemberi bantuan hukum dalam mencegah serta menangani kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan pekerja migran di tingkat desa dan kecamatan melalui sistem yang lebih inklusif, responsif, dan mudah diakses.

[Baca Selengkapnya](#)



Atas perkenan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

Personel Polisi Satwa dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia saat
melakukan simulasi deteksi narkotika
di Pawsome Fest 2026.



Pawsome Fest 2026 – Bentuk Apresiasi bagi Anjing Pelacak Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menyelenggarakan *Pawsome Fest 2026* pada 29 Agustus 2026 di Pusat Pelatihan K9, Kantor Pusat Bea dan Cukai. Pusat pelatihan K9 telah memperoleh dukungan selama bertahun-tahun melalui kerja sama dengan berbagai lembaga di Australia dan, sejak 2017, melalui AIPJ.

Pawsome Fest terbuka untuk masyarakat umum dan menjadi wadah bagi para pencinta hewan untuk berkumpul, mengenal lebih jauh dunia K9, serta membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi secara gratis.

[Baca Selengkapnya](#)



Para fellow dan perwakilan dari Tim
Pembaruan Peradilan Mahkamah
Agung setelah mengikuti sesi berbagi
pengalaman dan refleksi bersama
Kedutaan Besar Australia dan AIPJ3
sekembalinya mereka dari program
fellowship selama dua minggu.



Atas perkenan Dr. Aria Suyudi, Tim
Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung

Para fellow didampingi oleh Tim
Pembaruan Peradilan Mahkamah
Agung dalam diskusi mengenai
pembatalan merek dan beban
pembuktian.



Meningkatkan Daya Saing Indonesia: Belajar dari Sistem Peradilan Niaga Australia

Pada 25 Juli hingga 8 Agustus 2026, AIPJ3 mendukung pelaksanaan program *fellowship* yudisial intensif selama dua minggu bagi empat hakim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) di Federal Court of Australia (FCA), di Melbourne. Program ini bertujuan untuk mendukung agenda peningkatan daya saing nasional melalui studi komparatif mengenai praktik terbaik dalam sistem peradilan niaga Australia. Fokus tersebut sejalan dengan agenda pembaruan peradilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 serta berkontribusi pada peningkatan kinerja Indonesia berdasarkan indikator *Business Ready (B-Ready)* Bank Dunia dan penguatan kepatuhan terhadap standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Selama program berlangsung, keempat hakim peserta—Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., (Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., (Hakim Yustisial, Kamar Perdata, MA), Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., (Hakim, Pengadilan Negeri Jepara), dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., LL.M., (Hakim Yustisial, Biro Hukum dan Humas, MA)—bersama dengan Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M., dari Tim Pembaruan Peradilan MA, mengamati dan mendalami pendekatan FCA dalam menangani berbagai isu penting di bidang hukum niaga.

Program *fellowship* ini berfokus pada hukum persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, litigasi lintas batas dan pelaksanaan putusan asing, serta efisiensi operasional pengadilan niaga. Melalui pengamatan langsung terhadap praktik di FCA, para peserta memperoleh wawasan berharga mengenai cara menyeimbangkan pelaksanaan putusan yang efektif, perlindungan hak-hak para pihak, dan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses peradilan. Setelah kembali ke Jakarta, para hakim berbagi pengalaman dan refleksi dari program tersebut dengan Robert Sutton, Konselor Bidang Politik dan tim Kedutaan Besar Australia pada 10 Agustus 2026. Sebagai tindak lanjut, setiap peserta akan melaksanakan proyek pembaruan peradilan guna menerapkan pengetahuan, wawasan, dan praktik terbaik yang diperoleh selama *fellowship* dalam lingkup tugas masing-masing.



(dari kiri ke kanan) Dr. Ahmad Sofian, S.H. M.A. (Dosen Hukum Pidana, Universitas BINUS) dan Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro) sebagai pembicara pada sesi diskusi di hari terakhir lokakarya, dimoderasi oleh Riski Dysas Prabawani, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)



Beralih dari Pendekatan Punitif Menuju Restoratif: Mendorong Implementasi Pemidanaan Alternatif dalam Kerangka Hukum Pidana Baru di Indonesia

Pada 19-21 Agustus 2026, AIPJ3 mendukung Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Universitas Diponegoro, Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), dan Kementerian Hukum dalam menyelenggarakan lokakarya selama tiga hari yang bertujuan untuk memperkuat dan mengharmonisasikan implementasi pemidanaan alternatif modern setelah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) 2025 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lokakarya ditujukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai mengedepankan implementasi pemidanaan alternatif di Indonesia. Peserta mengeksplorasi konsep modern dari sistem “dua jalur”, sebuah model pemidanaan kontemporer yang menggabungkan sanksi pidana dan tindakan pembinaan dalam satu putusan pengadilan. Pendekatan ini merupakan bentuk respon terhadap pemikiran mengenai terbatasnya tingkat efektivitas dari suatu putusan pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk penghukuman, sekaligus dalam mengatasi tantangan berkaitan dengan kepadatan di lembaga pemasyarakatan.

Lokakarya dihadiri oleh lebih dari 100 orang perwakilan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum, yang berfokus pada tiga area reformasi utama:

Prinsip Dasar dan Kerangka Pemidanaan:

Peserta mengikuti pembahasan prinsip dasar terbaru dalam KUHP 2023, termasuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan kerangka pemidanaan. Diskusinya menekankan



Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., berdiri di tengah, dikelilingi oleh peserta pada sesi penutupan lokakarya.

pada penguatan peran sanksi pidana dan tindakan perbaikan sebagai landasan untuk mengembangkan pendekatan alternatif pemidanaan.

Kerangka Hukum Acara Pidana:

Lokakarya ini meninjau reformasi utama yang diperkenalkan melalui KUHP 2025, yang mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, praperadilan, penuntutan, pembuktian, upaya hukum, dan mekanisme penyelesaian perkara. Perhatian khusus diberikan pada reformasi yang mendukung penjatuhan pidana secara proporsional dan keadilan yang berpusat pada korban, termasuk keadilan restoratif, kesepakatan penundaan penuntutan, kesepakatan pengakuan bersalah, dan denda damai.

Harmonisasi Implementasi:

Para peserta mendiskusikan penerapan praktis KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Diskusi difokuskan pada kesiapan aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat setempat dalam melaksanakan pidana non-pemencaraan, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, denda, tindakan, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.

Lokakarya ini menegaskan kembali pentingnya kolaborasi berkelanjutan dan pertukaran pembelajaran di antara para pemangku kepentingan di Indonesia. Para peserta menyadari bahwa reformasi hukum pidana hanya dapat mencapai dampak yang diharapkan apabila perubahan legislasi disertai dengan perubahan sikap, penafsiran yang konsisten, serta kesiapan praktis di kalangan lembaga-lembaga sektor peradilan.

Sebagai tindak lanjut, ASPERHUPIKI akan meninjau 160 artikel oleh peserta lokakarya untuk dipublikasikan di kemudian hari dalam dua jurnal organisasi, yaitu *Asian Journal of Criminal Law and Criminal Justice* dan Jurnal Hukum Pidana Indonesia.



KPK Memperkuat Ekosistem Antikorupsi melalui Penguatan Kapasitas Perguruan Tinggi dan Pelibatan Publik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat pendidikan antikorupsi dan jejaringnya di perguruan tinggi melalui penyelenggaraan dua program strategis pada 27–29 Juli 2026, yaitu lokakarya integrasi panduan pendidikan antikorupsi dan *coaching clinic* penulisan opini bagi dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kedua program tersebut didukung oleh AIPJ3.



Atas perkenan KPK
Gandjar Laksmiana Bonaprpta, S.H., M.H. (Asisten Ahli, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia) sebagai narasumber pada sesi Membangun Budaya Antikorupsi.

Dengan memadukan penguatan pembelajaran berbasis kelas dan peningkatan pelibatan publik, KPK terus mendorong perguruan tinggi untuk menjadi mitra strategis dalam membangun budaya integritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi jangka panjang di Indonesia.

Program pertama, Lokakarya Panduan Integrasi Pendidikan Antikorupsi: Memberdayakan dan Memperkuat Partisipasi Dosen dalam Pembelajaran, mempertemukan 37 dosen dan calon pengajar pendidikan antikorupsi dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta, bersama dengan perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan pendidikan antikorupsi, strategi pengajaran yang efektif, serta metode praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam mata kuliah yang telah ada di perguruan tinggi.

“Jejaring praktisi pendidikan antikorupsi yang saat ini telah terbentuk di berbagai perguruan tinggi dan daerah diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi yang berkelanjutan, yang mendorong pertukaran materi, sumber daya, dan pengalaman dalam advokasi antikorupsi. KPK berharap para peserta dapat menjadi simpul aktif dalam jejaring ini dan bersama-sama memperkuat ekosistem antikorupsi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing,” ujar Cahya Harefa, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Program kedua, *Coaching Clinic* Penulisan Opini bagi Akademisi Antikorupsi 2026, merupakan bagian dari strategi KPK untuk memperluas dampak jejaring praktisi pendidikan antikorupsi (PAK) yang telah terbentuk, tidak hanya di lingkungan kampus. Program ini membekali para akademisi dengan keterampilan untuk menyampaikan pesan antikorupsi secara efektif melalui media massa dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.

“Kerja sama dengan media massa nasional dan daerah merupakan kunci untuk memastikan bahwa suara para akademisi dapat menjangkau dan memberikan pengaruh di ruang publik.”

Cahya Harefa

Coaching clinic ini melibatkan 15 dosen muda dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dari Yogyakarta, Malang, Bandung, Semarang, Mataram, Padang, Surabaya, Sumenep, dan Jakarta. Sesi-sesi pelatihan difasilitasi oleh para ahli dari Tempo Institute, Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta para praktisi dari KPK. Kedua inisiatif tersebut mencerminkan pendekatan komprehensif KPK dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.



Lemdiklat Polri Siapkan Kurikulum untuk Mewujudkan Profesional yang Kompeten dan Berintegritas

Pada 3 Agustus 2026, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri), dengan dukungan AIPJ3, menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) untuk mengembangkan kurikulum program diploma, Diploma 1 bagi tamtama dan Diploma 2 bagi bintangara, dengan menggunakan model pembelajaran terpadu.

Brigadir Jenderal Yusran Cahyo, Kepala Biro Pengembangan Kurikulum Lemdiklat Polri, menjelaskan bahwa kurikulum ini akan mengintegrasikan nilai-nilai fundamental ke dalam seluruh kegiatan pendidikan. “Nilai-nilai utama tersebut mencakup pemahaman yang mendalam mengenai hak asasi manusia, penerapan prinsip demokrasi, serta komitmen yang kuat terhadap nilai humanis. Pendidikan kepolisian pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia; para personel tidak hanya diajarkan untuk menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga dilatih untuk memahami akar permasalahan sosial dengan empati dan hati nurani,” ujarnya.

“Pendidikan kepolisian pada dasarnya merupakan proses memanusiakan manusia; para petugas tidak hanya diajarkan untuk menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga dilatih untuk memahami akar penyebab masalah sosial dengan empati dan hati nurani.”

Brigadir Jenderal Yusran Cahyo

FGD tersebut menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut konstruktif bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas). Proses pembelajaran akan menggabungkan pelatihan secara residential di Sekolah Polisi Negara (SPN) dengan pembelajaran daring setelah peserta ditempatkan untuk menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Dalam model ini, Akademi Kepolisian (Akp) akan berperan sebagai kampus utama, sementara SPN akan berfungsi sebagai program studi di luar kampus. Model tersebut diharapkan dapat membangun kemitraan pendidikan yang berkelanjutan.

Salam Hangat dari Tim Kami - Anggota baru sampai dengan September 2026.



Urutan kiri ke kanan:

- Nia Kurniawati, Grants and Contracts Coordinator
- Mira Budi Arsih, MEL Coordinator
- Norma Susanti, Activity Manager for Aceh
- Khalida Zia, Research and Data Officer for Aceh